

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**KESIMPULAN**

Rangkaian perjalanan sejarah yang panjang terhadap upaya-upaya dan **Strategi Republik Kosovo dalam Proses Mencapai Status Kedaulatannya pada Tahun 2008** telah berlangsung sejak didirikannya Kerajaan Yugoslavia hingga berakhirnya Yugoslavia era Tito. Perkembangan komposisi demografis penduduk wilayah Kosovo yang dipengaruhi oleh adanya fakta historis kekaisaran Turki Ottoman, telah membawa etnis Albania masuk ke wilayah Kosovo. Namun, jauh sebelumnya Kosovo merupakan wilayah yang dihuni oleh mayoritas penduduk etnis Serbia.

Peristiwa migrasi besar dipicu oleh adanya keberhasilan perluasan wilayah dominasi kaum Kristen Serbia dan Albania di wilayah Eropa Tenggara. Peristiwa tersebut kemudian menyebabkan terjadinya perlawanan kaum Kristen terhadap Muslim Balkan sehingga penduduk muslim terdesak menuju arah Kosovo, Macedonia hingga ke kota Skopje. Migrasi besar ini dimaknai sebagai proses bermulanya kemunduran legitimasi kekuasaan kekaisaran Turki Ottoman di wilayah Balkan, dan munculnya pengakuan kedaulatan beragama oleh kekaisaran Turki Ottoman.

Berakhirnya kekuasaan kekaisaran Turki Ottoman menjadikan perpecahan dalam tatanan masyarakat di wilayah Kosovo. Namun perpecahan tersebut dapat dipersatukan kembali dengan didirikannya kerajaan Yugoslavia pada tahun 1918

guna mendukung persatuan berbagai kelompok etnis pasca keruntuhan kekaisaran Turki Ottoman. Akibat dari pendirian kerajaan Yugoslavia telah memberikan dampak terhadap komposisi demografis penduduk Kosovo menjadi mayoritas etnis Kosovo-Albania.

Sejak menjadi kelompok masyarakat dominan, rakyat etnis Kosovo-Albania mendesak untuk mendapatkan otonomi yang luas, menuai kecaman dari Raja Peter I Karađorđević. Raja Peter berupaya untuk menjadikan tanah bangsa slavia yang bersatu tanpa adanya disintegrasi antar kelompok masyarakat yang ada. Hingga berakhirnya kerajaan Yugoslavia dan munculnya Yugoslavia yang baru di era pemerintahan Tito tidak mengubah keinginan masyarakat etnis Kosovo-Albania dalam tuntutan mereka terkait otonomi dan kedaulatan.

Kemunduran kekuasaan Tito menjadi kunci awal perjuangan pergerakan kemerdekaan di wilayah Kosovo. Sejak tahun 1963 kedudukan Kosovo berhasil mendapatkan pengakuan atas entitas Kosovo-Albania adalah bagian dari bangsa Slavia. Hal ini ditandai dengan pemberian status atas sektor politik, sektor pendidikan, sektor ekonomi dan simbol budaya tertentu yang dapat digunakan oleh rakyat Kosovo di tingkat federal. Pengakuan pemerintah federal atas status provinsi otonomi Kosovo kembali menimbulkan permasalahan ketika mayoritas rakyat etnis Albania memulai demonstrasi di ibu kota Prishtina. Tahun 1981 gelombang demonstrasi terjadi di wilayah ibukota Kosovo yang dipicu oleh tuntutan rakyat Kosovo-Albania agar Kosovo menjadi republik dalam federasi Yugoslavia.

Peristiwa tersebut menimbulkan permasalahan lainnya. Gejolak tuntutan rakyat etnis Serbia untuk melakukan referendum penghapusan status otonomi bagi

Kosovo sebagai akibat dari stigma anti-Serbia yang oleh etnis Kosovo-Albania. Tuntutan etnis Serbia akhirnya berujung pada keberhasilan dari pemerintah federal dengan dihapuskannya status provinsi otonomi bagi Kosovo pada tahun 1989. Akibatnya segala urusan Kosovo ditangani langsung oleh pemerintah pusat Republik Serbia. Bentuk otonomi yang sudah didapatkan oleh Kosovo sejak perjalanan dalam Yugoslavia pada akhirnya justru meninggalkan permasalahan dalam tuntutan kedaulatan itu sendiri. Permasalahan ini semakin berlanjut ketika pemerintahan Tito akhirnya mengalami kemunduran dan bermulanya keruntuhan Federasi Republik Sosialis Yugoslavia.

Keterlibatan faktor eksternal dalam mendukung eksistensi Kosovo sudah terjadi sejak dimulainya perang Balkan yang ditandai dengan upaya kemerdekaan Kroasia dan Bosnia. Akibat dari perang yang terjadi di wilayah Kroasia dan Bosnia, menjadikan faktor eksternal ikut memberikan andil dalam proses negosiasi antara pemerintahan Yugoslavia dibawah Slobodan Milošević dengan kaum partisan separatisme Kroasia dan Bosnia. Hal ini kemudian juga merembet hingga peristiwa perang yang terjadi di Kosovo sejak tahun 1998. Pada akhirnya masuknya faktor internasional yang melakukan penetrasi di wilayah Yugoslavia turut serta memberikan dampak kepada perjuangan Kosovo dalam mempertahankan eksistensinya.

Beberapa organisasi internasional dikenal turut andil dalam memberikan eksistensi atas keberadaan Kosovo. Badan internasional tersebut antara lain: Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa. Bahkan, organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) juga telah memberikan sumbangsuhnya yang cukup besar

dalam mempertahankan eksistensi Kosovo. Sepanjang sejarah terdapat kekuatan negara besar (*superpower*) yang memberikan dukungannya atas eksistensi Kosovo. Sehingga dari berbagai faktor tersebut menghasilkan kedudukan Kosovo semakin menguat di tingkat internasional.

Munculnya banyak dukungan internasional yang diberikan kepada entitas Republik Kosovo dari pelbagai organisasi internasional maupun misi khusus, memberikan sinyal positif bagi isu kedaulatan Kosovo. Namun Republik Serbia dibawah kekuasaan Milošević, memberikan kecaman keras apabila keterlibatan tersebut justru akan semakin memberikan dampak negatif terhadap proses negosiasi antar pihak. Sejak kepemimpinan presiden Slobodan Milošević hingga Boris Tadić, pihak Serbia tetap bersikeras untuk mempertahankan kedaulatan yuridiksi atas wilayah Kosovo. Namun, pihak otoritas Kosovo melalui KFOR selalu menuntut dan berupaya agar kedaulatan atas wilayah Kosovo dapat dicapai melalui keterlibatan faktor eksternal di wilayah Kosovo.

Gejolak politik mengenai isu kedaulatan yang dihadapi oleh Kosovo mengakibatkan banyak pihak turut serta untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga berbagai pihak berupaya secara maksimal guna menanggulangi timbulnya dampak sosial yang besar terhadap rakyat Kosovo atas kedaulatan yang dituntut oleh mayoritas kelompok etnis Kosovo-Albania. Keberadaan kelompok masyarakat etnis Kosovo-Albania menjadi salah satu faktor yang vital dalam perjuangan rakyat Kosovo dalam menuntut kedaulatan dan kemerdekaannya.

Namun, Kosovo tetap bersikeras bahwa upaya mencapai kedaulatan yang berujung pada peristiwa kemerdekaan adalah hakikat sebuah bangsa guna

memenuhi kebutuhan bersama. Beberapa faktor eksternal yang ikut terlibat dalam proses negosiasi antar kedua pemerintah memberikan hasil yang nihil. Sehingga upaya kemerdekaan Kosovo tetap dilihat sebagai sebuah tindakan yang mengancam bagi kedaulatan sebuah bangsa yang telah ada (Republik Serbia), atas sebuah calon negara yang baru Republik Kosovo.

Kemunculan UNMIK dan UNOSEK yang menjadi penengah secara resmi dalam isu kedaulatan Kosovo nyatanya tidak memberikan implikasi dan akibat yang cukup besar terhadap titik temu kepentingan yang ada. Hal ini justru semakin meningkatkan tendensi bahwa rakyat Kosovo berhak untuk melakukan tindakan penentuan nasib masa depannya. Fakta keterlibatan pihak ketiga dalam proses negosiasi yang tidak kunjung membuahkan hasil semakin meyakinkan rakyat Kosovo akan status kemerdekaan yang dapat diraih oleh Kosovo. Hingga Perundingan Troika berakhir pada tanggal 7 Desember 2007, kesepakatan tetap tidak dapat diraih oleh kedua belah pihak dalam menangani kasus tuntutan kedaulatan Kosovo.

Peristiwa deklarasi kemerdekaan tersebut menjadi sebuah babak baru bagi Kosovo untuk dapat mengurus segala urusan dalam negeri dengan landasan hukum internasional yang kuat. Pemerintah Serbia didukung oleh Rusia sangat mengecam tindakan deklarasi kemerdekaan Kosovo tanggal 17 Februari 2008, dan menganggap sebagai upaya separatisme terhadap wilayah kedaulatan Serbia. Namun, dibalik berbagai kecaman yang dilancarkan oleh Serbia dan Rusia, Kosovo semakin mendapatkan dukungan atas eksistensinya dari dunia internasional.